

PERKEMBANGAN POLITIK ISLAM DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Handoko

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

Email: hokohan@yahoo.co.id

Abstrak: Perkembangan politik di Indonesia sejak zaman orde lama, orde baru sampai era reformasi yang terjadi di Indonesia merupakan sejarah Panjang yang memiliki implikasi terhadap berbagai bidang kehidupan di antaranya yaitu dalam bidang Pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan politik yang muncul pada berbagai orde tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dalam Pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan mengkaji literatur-literatur yang sesuai dengan topik perkembangan politik Islam di Indonesia dan kaitannya dengan Pendidikan Islam. Hasil dari pembahasan ini di antaranya yaitu kesenjangan antara Pendidikan Islam dengan Pendidikan umum, kebijakan terhadap legalitas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Sistem Pendidikan Nasional, dan porsi pembelajaran PAI di lembaga pendidikan umum.

Kata kunci: Politik Islam Indonesia, Pendidikan Islam

Abstract: Political developments in Indonesia since the old era (*orde lama*), the new era (*orde baru*) until the reform era (*pasca-orde baru/reformasi*) that occurred in Indonesia is a long history that has implications for various fields of life, including in the field of Islamic education. The political policies that emerged in these various orders certainly greatly influenced the existing policies in Islamic education. This research is library research by reviewing the literature that is in accordance with the topic of the development of Islamic politics in Indonesia and its relation to Islamic education. The results of this discussion include the gap between Islamic education and general education, policies on the legality of Islamic Education in the National Education System, and the portion of Islamic education learning in general education institutions.

Keywords: Indonesian Islamic Politics, Islamic Education

Pendahuluan

Ajaran Islam sebagai ajaran yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, juga diyakini mengandung kajian mengenai masalah politik dan keagamaan.¹ Eksistensi politik dalam Islam dapat diketahui melalui pemahaman yang utuh terhadap cakupan ajaran Islam itu sendiri,² bahwa Islam memiliki konsep tentang politik. Keterkaitan agama Islam dengan aspek politik dapat dirujuk ulang pada persoalan pertama yang timbul dalam Islam, menurut sejarah bukanlah persoalan tentang keyakinan melainkan persoalan politik.³

Lepas dari adanya penolakan terhadap keterkaitan Islam dengan politik dan hubungannya dengan urusan keagamaan,⁴ artikel ini berusaha menyajikan politik Islam khususnya di Indonesia sebagai realitas yang ada dan hadir dalam kehidupan. Indonesia dengan mayoritas umat Islamnya, pastinya terimbas oleh berbagai permasalahan yang berkait erat dengan politik, seperti

¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam: Eksistensi Politik dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. VI, 269.

² Abudin Nata dalam *Metodologi Studi Islam: Model Penelitian Politik* (2001: 267).

³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid II, (Jakarta: UI Press, 1979), cet. I, 92.

⁴ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam: Eksistensi Politik dalam Islam*, 265.

perseteruan antara negara dan agama, perseteruan Islam politik dengan Islam kultural, polarisasi politik, fragmentasi politik, repolitisasi dan politisasi agama, integrasi politik yang berkedok sebagai integrasi umat, terbebasnya publik politik dari belenggu kultural dan struktural (*democracy abuse*), dan polarisasi sosial yang berdampak terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

Pembahasan

A. Politik Islam Masa Orde Baru

Pembahasan mengenai Islam pada masa Orde Baru ditandai dengan perubahan besar, baik secara institusional⁵ maupun dalam bentuk perubahan pemikiran⁶ berbagai ajaran agama ini, setidaknya selama satu dasawarsa terakhir. Perubahan itu tampak jelas pada perkembangan Islam dewasa ini dibanding dengan masa awal Orde Baru, dan lebih-lebih lagi kalau ditelusuri jauh kebelakang sampai awal abad ini.

Perubahan besar tersebut, pada perkembangannya menyisakan permasalahan yang tidak bisa lepas dari faktor penyebab perubahan, yaitu munculnya perdebatan dikalangan para pengamat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan. Sebagian pengamat berpendapat bahwa perubahan yang dialami Islam dalam bidang politik dan pemikiran keagamaan pada masa Orde Baru ini merupakan konsekuensi logis dari proses modernisasi dan desakan politik pemerintah selama lebih dua dasawarsa.

Proses modernisasi membawa perubahan institusional dan wawasan umat. Salah satu inti modernisasi adalah rasionalisasi, sehingga umat dapat lebih terdorong untuk bersikap lebih rasional dan realistis. Sedangkan desakan politik pemerintah menyebabkan umat harus ikhlas menerima fusi partai dan penetapan asas tunggal Pancasila. Karena kedua hal ini merupakan bagian dari kebijaksanaan besar pembangunan politik Orde baru yang tidak dapat ditawar lagi. Namun, tidak sedikit pula pengamat Islam yang menilai perubahan Islam bukan karena faktor modernisasi dan desakan politik Orde Baru,⁷ tetapi lebih merupakan kelanjutan dialog internal yang telah berjalan dikalangan umat Islam.

Di dalam penelitiannya, Din Syamsuddin menyatakan bahwa Islam Indonesia dihadapkan pada kenyataan tentang kuatnya semangat pribumi (*indigenious*) di kalangan umat Islam sendiri yang tidak menghendaki "Islam Politik". Mereka ini dominan di pentas politik nasional. Maka

⁵ Tebba, Sudirman. (1993), *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), xv.

⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 115.

⁷ Bahtiar Effendy dalam *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 112

kemudian Islam tidak banyak dihadirkan di arena politik praktis untuk merebut kekuasaan, melainkan dalam dakwah, yang secara substansial juga mengandung muatan politik: *amar ma'ruf naby munkar*. Perubahan dari Islam politik ke dakwah ini merupakan hasil intropeksi budaya, yang merupakan akibat dari hubungan tidak seimbang antara Islam dan negara: Islam berada pada posisi *inferior* sedangkan negara berada pada posisi *superior*.⁸

Dalam perkembangannya kemudian setelah banyak orang Islam yang berpendidikan, agama, dan umum, umat lalu mengalami suatu masalah baru tentang kesenjangan antara yang berpengetahuan agama dengan berpendidikan umum. Masalah ini membawa polarisasi dalam kehidupan politik, yakni antara mereka yang berafiliasi kepada partai Islam dengan orang-orang Islam yang tergabung dalam partai-partai politik yang tidak membawa bendera Islam.

Polarisasi politik ini berpengaruh pada munculnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam pada awal 1970-an. Salah satu inti gerakan ini adalah perlunya perwujudan integrasi umat dengan melihat kembali (memperbaharui) paham agama yang dianut umat Islam selama ini. Integrasi umat ini diwujudkan dengan menghilangkan perpecahan politik dan membangun kehidupan sosial baru yang maju di segala bidang. Karena kehidupan sosial yang sejahtera dan diridhoi Tuhan (*baladatum thayyibah wa rabbun ghafur*) merupakan substansi politik Islam. Sedangkan partai politik, parlemen, dan negara bukan tujuan politik Islam, tetapi hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut.⁹

Setelah penerapan serangkaian kebijaksanaan politik Orde Baru, yakni fusi partai politik Islam yang melahirkan PPP tahun 1973 dan penetapan asas Pancasila¹⁰ bagi PPP tahun 1984, integrasi umat seakan-akan sudah tercapai. Wujud adanya integrasi itu tidak berarti bahwa persoalan umat sudah selesai. Karena yang terwujud hanyalah integrasi politik. Sedangkan integrasi sosial masih menghadapi tantangan yang berat dengan terjadinya kesenjangan sosial¹¹ yang tajam termasuk dalam bidang Pendidikan Islam.

B. Islam Politik Pasca-Soeharto

Dinamika kehidupan politik Indonesia yang merangkak dalam pergerakan reformasi, menjelaskan wajah Islam politik serta manuver-manuver politik partai-partai Islam pasca-Soeharto. Islam politik secara umum dipahami sebagai Islam yang ditampilkan sebagai basis

⁸ M. Din Syamsuddin, *Islamic Political Thought and Cultural Revival in Modern Indonesia*, Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 2, No. 4, 1995.

⁹ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), xvii

¹⁰ Masdar Hilmy, *Muslims' Approaches to Democracy: Islam and Democracy in Contemporary Indonesia*, Journal of Indonesian Islam, Volume 01, No. 01, June 2007.

¹¹ (Tebba, 1993: xviii-xix).

ideologi yang kemudian menjelma dalam bentuk partai politik atau Islam yang berusaha diwujudkan dalam kelembagaan politik resmi.¹²

Gagasan pendekatan kultural dari pada pendekatan politik Islam dalam Islamisasi Indonesia membuka ruang bagi mungkin-pribumisasi Islam, yakni mewujudkan nilai-nilai universal Islam ke dalam kultur bangsa Indonesia yang beragam. Dalam konteks ini pula kultur Islam harus dipandang hanya sebagai salah satu dari sekian banyak kultur bangsa. Ia hanya bersifat komplementer terhadap kultur Indonesia secara keseluruhan. Dengan pemikiran ini diharapkan masyarakat Muslim punya kesadaran kebangsaan, dan negara Indonesia harus dibangun atas kesadaran ini.¹³

Strategi kultural ini cukup berhasil dengan banyaknya kaum terdidik dari kalangan Islam yang memberikan polesan wajah Islam yang ramah, santun, dan menyejukan dan Islam kultural ini relatif bisa diterima oleh rezim penguasa. Namun, ketika era reformasi, Islam politik yang dulu ditekan oleh rezim otoriter Orde Baru telah menemukan ruang politiknya kembali. Islam politik mengalami *euforia* kebebasan yang luar biasa. Islam politik menyeruak ke permukaan dan sempat menimbulkan kekhawatiran akan menyebabkan tenggelam kembali Islam kultural.

Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah *euforia* politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 32 tahun telah terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.¹⁴

Dengan terbukanya pintu liberalisasi tersebut, publik politik Indonesia merasa terbebaskan dari belenggu kultural dan struktural yang selama ini menyulitkan dan membatasi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional serta dalam melakukan kontrol sosial politik terhadap proses penyelenggaraan negara. Sebagai akibatnya, muncul berbagai partai sebagai kendaraan politik Islam, baik yang berasas Islam maupun yang tidak. Inilah barangkali yang akan mewarnai wacana politik Islam pasca Orde Baru. Dalam konteks ini, sesungguhnya masyarakat tidak perlu khawatir, bahwa hadirnya partai yang menggunakan idiom dan simbol Islam, bukan

¹² Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), Cet. I (16 Agustus 2003 kompas.com).

¹³ M. Din Syamsuddin, *The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics in the New Order Indonesia*, Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Vol. 2, No. 2, 1995.

¹⁴ M. Rozi T.B, *Politik Islam Indonesia di Masa-Masa yang Akan Datang, Prospek dan Tantangan-tantangannya*, Pusat Kajian Islam, <http://www.alislam.com>, 17 January 2003

merupakan sejarah ulangan periode 50-an. Penggunaan idiom dan simbol Islam itu tampaknya hanya diarahkan untuk mencari dukungan publik yang secara mayoritas beragama Islam.¹⁵

Menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana peta Islam politik pasca-Soeharto atau era reformasi. Dalam konteks ini, wujud Islam politik berupa partai-partai politik yang berbasiskan Islam dengan tidak lagi memiliki imajinasi politik berdirinya negara Islam. Generasi baru umat Islam yang mendirikan partai politik dalam era reformasi adalah generasi yang berbeda visi dan orientasinya, dimana mereka lebih pragmatis dan realistis memasuki sistem politik yang tersedia guna meraih peluang dan kesempatan yang sebesar-besarnya dengan tetap berpijak kepada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai etik.

Lebih dari itu, arus formalistik menekankan penggunaan bentuk-bentuk Islam yang diikuti secara ketat dan simbol-simbol budaya Arab yang dipercaya sebagai Islam yang murni. Penekanan penggunaan terma-terma budaya Arab di negara non-Arab seperti Indonesia, menunjukkan pentingnya bagi mereka formalisasi keagamaan. Makna-makna substansif yang bisa diungkapkan dengan bahasa lain dipandang kurang penting dibanding kalau diungkapkan dalam bahasa Arab. Tekanannya di sini terletak pada pengaruh nyata dari kata-kata dari pada makna epistemologis dari pemahaman.¹⁶

Pada akhirnya, wujud Islam politik dengan berbagai partai politik yang berbasiskan Islam hanya memecah belah kesatuan Muslim Indonesia. Fragmentasi politik pun tidak bisa dipungkiri menjadi ciri tersendiri Islam politik era reformasi. Fragmentasi politik,¹⁷ hal ini ditandai dengan keinginan dari semua elit politik Islam yang ingin menjadi pemimpin daripada mendahulukan untuk perjuangan kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Berdirinya 40 partai politik Islam yang kemudian menyusut karena proses seleksi adalah bentuk dari terfragmentasi umat Islam karena ulah para pemimpinnya yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan kelompoknya.¹⁸

Banyaknya pemimpin atau elite politik Islam yang mendirikan partai politik, menurut Nurcholis Madjid, cerminan dari egoisme politik yang merasuki kalangan elit politik, sedangkan Azyumardi Azra melihat elite politik Islam yang mendirikan partai politik yang

¹⁵ Yayan Suryana, *Wacana Politik Islam Pasca Orde Baru*, <http://www.geocities.com>.

¹⁶ M. Din Syamsuddin, *Islamic Political Thought and Cultural Revival in Modern Indonesia*, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 2, No. 4, 1995.

¹⁷ Muhtadi dalam resensi "Potret Islam Politik di Era Reformasi", <http://www.sinarharapan.co.id>.

¹⁸ *Zainal Abidin Amir, Peta Islam Politik Pasca-Soeharto, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), Cet. I, 3.*

berbeda-beda adalah cerminan dari motivasi yang hanya untuk mengejar kekuasaan belaka, bukan demi kepentingan umat Islam.¹⁹

Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena kemunculan partai-partai Islam, dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau yang secara salah kaprah diistilahkan sebagai “repolitisasi Islam”. Penilaian yang pertama bernada positif, karena seperti agama-agama lain, Islam memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Penilaian kedua, jika istilah itu dipahami secara benar, adalah negatif. Istilah “politisasi” terhadap apa saja termasuk agama, selalu merupakan bagian dari rekayasa yang bersifat pejoratif atau manipulatif. Bisa dibayangkan apa jadinya jika hal tersebut dikenakan pada sesuatu yang mempunyai sifat ilahiah (*devine*) seperti agama Islam.²⁰

Diluar partai-partai Islam yang telah mengalami fragmentasi, partai lain yang menggusung Gerakan Islam Transnasional, terwakili oleh-dengan diberikannya keleluasaan berserikat kepada Hizbut Tahrir Indonesia menunjukkan hal lain dalam diskursus politik Muslim di Indonesia pasca-Soeharto.

Gerakan Islam Transnasional di mata Hasyim Muzadi, sepenuhnya adalah Arab yang latar budaya, pemikiran dan sosialnya tidak sama dengan Indonesia. Dengan kata lain, bahwa ideologi transnasional tidak berasal dari kepribadian bangsa Indonesia. Gerakan Islam Transnasional bukanlah murni gerakan keagamaan namun merupakan gerakan politik. Untuk menjalankan aktivitasnya, tugas agama dan politik disatukan. Menurut Hasyim, keduanya mempunyai tujuan berbeda. Agama dengan dakwahnya, bertujuan mulia, yaitu menyebarkan ajaran Islam sedangkan politik bertujuan jangka pendek, yakni kekuasaan. Bahasa sederhananya adalah politisasi agama.²¹

Di Indonesia, jalan pintas bagi tegaknya keadilan dengan melaksanakan syariat Islam melalui kekuasaan, ditempuh lebih dikarenakan miskinnya pengetahuan kelompok-kelompok Islam Transnasional tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana disamping disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Jika secara nasional belum mungkin, maka diupayakan melalui Perda-Perda (Peraturan Daerah).

Menyertai keprihatinan kelompok-kelompok fundamentalis tentang kondisi Indonesia yang jauh dari keadilan, tetapi cara-cara yang mereka gunakan sama sekali tidak akan semakin

¹⁹ Muhtadi dalam resensi “Potret Islam Politik di Era Reformasi”, <http://www.sinarharapan.co.id>.

²⁰ M. Rozi T.B, *Politik Islam Indonesia di Masa-Masa yang Akan Datang, Prospek dan Tantangan-tantangannya*, Pusat Kajian Islam, <http://www.alislamu.com>, 17 January 2003.

²¹ Yudi Helmi dalam situs pribadinya, *Muhammadiyah, NU, dan Gerakan Transnasional*, 19 Mei 2007.

mendekatkan negeri ini kepada cita-cita mulia kemerdekaan, malah akan membunuh cita-cita itu di tengah jalan, Syafii Maarif menyimpulkan bahwa masalah Indonesia, bangsa Muslim terbesar di muka bumi, tidak mungkin dipecahkan oleh otak-otak sederhana yang lebih memilih jalan pintas, kadang-kadang dalam bentuk kekerasan.²²

Hal lain yang menarik untuk dicermati-meski terlalu naif untuk dilakukan-dalam diskursus politik Islam era reformasi, disamping meningkatnya eskalasi tindak kekerasan atas nama agama,²³ adalah adanya fenomena penyebaran perjuangan penegakkan syariat Islam ke daerah-daerah mengiringi pemberlakuan kebijakan desentralisasi.

Perjuangan menegakkan syariat Islam sekarang mengalami lokalisasi. Kalau pada masa lalu ide tersebut terfokus pada usaha untuk mengubah dasar negara dan sistem pemerintahan, sekarang ide tersebut terfokus pada usaha untuk memberi warna 'syariat' pada peraturan daerah. Lalu, lahirlah apa yang disebut peraturan daerah (perda) syariat Islam-selanjutnya ditulis 'perda syariat'-yang merupakan ekspresi politik Muslim Indonesia pasca-Soeharto yang paling sering mendapat sorotan.

Dalam kasus perda syariat, kerinduan terhadap otentisitas keagamaan berhasil menggalang solidaritas yang dibutuhkan oleh sebuah masyarakat yang sedang resah. Produk perundang-undangan yang ada, selama ini dianggap sebagai produk Barat yang telah gagal, oleh karena itu harus segera diganti dengan produk baru yang lebih otentik. Dengan kata lain, islamisasi peraturan daerah perlu diwujudkan.

Padahal, jika melihat UU No. 22/1999, persoalan agama tidak dilimpahkan kewenangan pengaturannya ke daerah.²⁴ Namun, fakta menunjukkan lain. Akibatnya, selain menimbulkan permasalahan karena seringkali bertentangan dengan produk hukum di atasnya, kehadiran perda syariat ini secara umum menunjukkan ketidakmampuan negara berdiri di atas semua elemen warga negara yang berbeda-beda.

Berangkat dari fakta demografis yang menunjukkan penduduk Indonesia sebagian besar adalah Muslim, mereka berpendapat bahwa Muslim adalah kelompok yang paling berhak menentukan arah perjalanan politik bangsa ini. Yang menarik, sekaligus agak mengejutkan,

²² Ahmad Syafii Maarif, *Prologue: Masa Depan Islam di Indonesia dalam Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Desantara Utama Media, 2009), 7.

²³ Fawaizul Umam, *Membakar Massa dengan Fatwa*, Newsletter, CRCS, April 2008.

²⁴ Taufik Adnan Amal dan Syamu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Alvabet, 2004), 98.

mereka menggunkan terma-terma politik modern dalam mengungkapkan argumentasinya, seperti seringnya menggunakan alasan demokrasi untuk memaknai kehadiran mereka dalam politik.²⁵

Diskursus politik Islam dalam dua sejarah, baik Orde Baru maupun era Reformasi (pasca Soeharto) ditandai dengan adanya perubahan besar secara institusional maupun dalam bentuk pemikiran, telah memberi gambaran ketidakharmomonisan sebuah hubungan. Di rezim Soeharto, hubungan politik ditandai oleh permusuhan timbal-balik. Adanya antagonisme politik antara Islam dan negara antara lain disebabkan oleh idealisme dan aktivisme Islam politik yang bercorak legalistik dan formalistik.

C. Keterkaitan Politik Islam dengan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pemerintah kolonial terhadap pendidikan agama sangat sarat akan kepentingan politik. Kolonial sadar bahwa pendidikan agama menanamkan sikap-sikap yang mengancam kekuasaan pemerintah kolonial. Oleh karenanya, berbagai kebijakan dari kolonial ini dibuat agar pendidikan agama tidak berkembang. Agama (khususnya Islam) tidak memberikan konsep negara secara detail. Oleh karenanya, berbagai kajian mengenai hubungan antara negara dan agama masih berlangsung sampai abad modern. Berbagai kajian ini membentuk berbagai 3 golongan, yaitu golongan yang berpendapat bahwa negara dan agama adalah dua hal yang terpisah, golongan yang berpendapat sebaliknya yaitu negara dan agama adalah dua hal yang saling berkaitan erat, serta golongan ketika yang mencoba berada di titik tengah antar keduanya.²⁶

Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan agama sebelum tahun 2003 ditandai dengan berubah dan berkembangnya kurikulum pendidikan nasional. Dari adanya pengaruh demokrasi terpimpinnya Soekarno dalam pendidikan, pengaruh dibubarkannya PKI terhadap dunia pendidikan, serta mulai adanya dualisme kebijakan pendidikan nasional, yaitu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Departemen Agama. Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan setelah tahun 2003 sangat dipengaruhi oleh Undang-undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) tahun 2003. Berbagai kebijakan pendidikan Islam setelah tahun 2003 adalah mencakup kurikulum, anggaran, dan kelembagaan.²⁷

²⁵ Amin Mudzakkir, *Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya*, di Seminar Internasional IX, Yayasan Percik, "Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang / Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara". Salatiga, 15-18 Juli 2008.

²⁶ Ahmad Fikri Sabiq, *Kebijakan Politik dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia*, *Lentera: Jurnal Diklat Keagamaan Padang*, vol. 5, No. 2, Juni 2021, 12-13

²⁷ Ahmad Fikri Sabiq, *Kebijakan Politik dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia*, 13.

Kesimpulan

Substansi politik yang dikonseptualisasikan dalam konstruk kesatuan nasional negara Pancasila sebagai ideologinya, dipandang sebagai tatanan politik sekuler. Sedangkan wacana politik Islam pasca Orde Baru merupakan sebuah babakan baru perjalanan sejarah setelah dalam beberapa dasawarsa mengalami eksperimentasi politik. Politik Islam pasca Orde Baru (reformasi) bukan merupakan “daur ulang” politik masa lampau, dalam pengertian muatan pembentukan pemerintahan Islam, tetapi berakar dari pilihan intelektual setelah mengalami *intellectual exercise*. Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Adapun implikasinya terhadap kebijakan-kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia yaitu: (1) Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan agama sebelum tahun 2003 ditandai dengan berubah dan berkembangnya kurikulum pendidikan nasional serta mulai adanya dualisme kebijakan pendidikan nasional, yaitu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan Departemen Agama. (2) Kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan setelah tahun 2003 sangat dipengaruhi oleh Undang-undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) tahun 2003. Berbagai kebijakan pendidikan Islam setelah tahun 2003 adalah mencakup kurikulum, anggaran, dan kelembagaan.

Referensi

- Adnan Amal, Taufik dan Syamu Rizal Panggabean. (2004), *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Alvabet.
- Amir, Zainal Abidin. (2003), *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto, cet. I*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, sdm/litbang Kompas resensi.
- Effendy, Bahtiar. (1998), *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Ali-Fauzi, Jakarta: Paramadina.
- Hilmy, Masdar. (2007), *Muslims' Approaches to Democracy: Islam and Democracy in Contemporary Indonesia*, Journal of Indonesian Islam, Volume 01, No. 01.
- Muhtadi, resensi buku bertopik “Potret Islam Politik di Era Reformasi”, www.sinarharapan.co.id.
- Mudzakkir, Amin. *Politik Muslim dan Ahmadiyah di Indonesia Pasca Soeharto: Kasus Cianjur dan Tasikmalaya*, <http://penelitianku.wordpress.com>.
- Nasution, Harun. (1979), *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid II, cet. I, Jakarta: UI Press.
- Nata, Abudin. (2001), *Metodologi Studi Islam*, cet. VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Ahmad Fikri. Kebijakan Politik dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Indonesia, *Lentera: Jurnal Diklat Keagamaan Padang*, vol. 5, No. 2, Juni 2021

Syamsuddin, M. Din. (1995), *The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics in the New Order Indonesia*, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol. 2, No. 2.

Syamsuddin, M. Din. (1995), *Islamic Political Thought and Cultural Revival in Modern Indonesia*, *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 2, No. 4.

Suryana, Yayan. *Wacana Politik Islam Pasca Orde Baru*, <http://www.geocities.com>.

T.B, M. Rozi, *Politik Islam Indonesia di Masa-Masa yang akan Datang, Prospek dan Tantangan-tantangannya*, Pusat Kajian Islam, <http://www.alislamu.com>, 17 January

Tebba, Sudirman. (1993), *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Umam, Fawaizul. *Membakar Massa dengan Fatwa*, Newsletter, CRCS, April 2008.